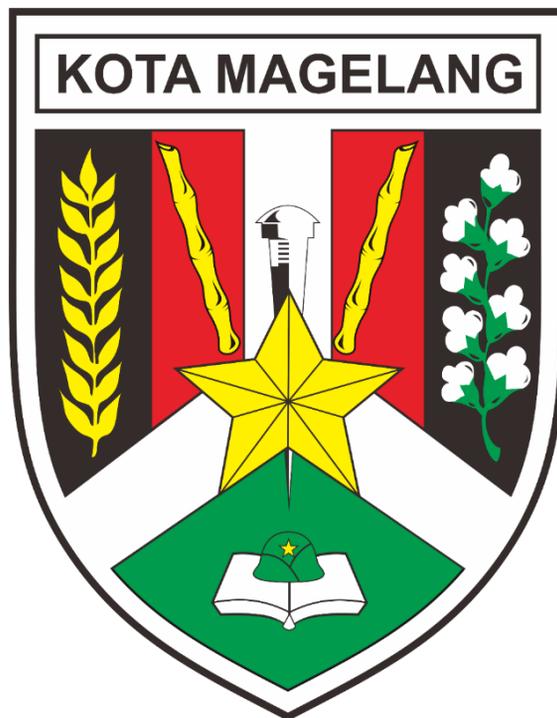


**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
TAHUN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	.ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	29
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV : PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020	7
Tabel 2.2	Capaian Renstra s.d Tahun 2020	7
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	16
Tabel 2.4	Kegiatan Baru Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022	19
Tabel 2.5	Program Kegiatan Yang Berhubungan Masyarakat	21
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Tahun 2022 Pada DPMPTSP Kota Magelang.....	31
Tabel 3.2	Definisi Operasional Indikator Kinerja Daerah Pada DPMPTSP Kota Magelang.....	32
Tabel 3.3	Program Kegiatan Subkegiatan Indikatif Tahun 2022	33
Tabel 3.4	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2022.....	38
Tabel 3.5	Rencana Pelaksanaan Kinerja Tahun 2022 DPMPTSP Kota Magelang.....	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Kemudahan Berusaha di Indonesia	15
Grafik 2.2	Arah Kebijakan Pembangunan	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu selama lima tahun (jangka menengah) yang berisi penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi PD. Penjabaran tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja tujuan dan sasarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Renstra PD masih perlu dijabarkan lagi dalam Rencana Kerja untuk dapat dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Hal tersebut untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Program, kegiatan dan subkegiatan meliputi program, kegiatan dan subkegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Lokasi kegiatan sebagaimana merupakan lokasi atau tempat dari setiap subkegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja terdiri dari

indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program dan indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari kegiatan dan indikator subkegiatan memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan keluaran yang akan dicapai dari subkegiatan. Kelompok sasaran memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil subkegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program ,kegiatan dan subkegiatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP merupakan Perangkat Daerah dengan tipe B dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Secara efektif, DPMPTSP melaksanakan tugas dan fungsinya sejak 1 Januari 2017.

Tahun 2022 masuk dalam periode pembangunan jangka menengah daerah Kota Magelang tahap I, dengan arah kebijakan pembangunan ditujukan untuk penanganan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Arah kebijakan ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2022 untuk diimplementasikan melalui RKPD tahun 2022, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan rencana kerja karena adanya upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi maupun penyesuaian terhadap kebijakan pusat yang harus diimplementasikan didaerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
 24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun

- 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
 28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2);
 29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pada Tahun Anggaran 2022.

2. TUJUAN

- a. Menyediakan acuan dan panduan dalam menentukan kinerja, prioritas, program dan kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2022;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja dan acuan evaluasi tahun 2022;
- c. Memberikan gambaran kondisi umum Tahun 2022 dalam rangka turut mewujudkan Visi dan Misi Walikota serta Wakil Walikota Magelang;
- d. Memudahkan seluruh jajaran DPMPTSP Kota Magelang untuk mengetahui arah kebijakan dan program serta kegiatan tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Renja DPMPTSP adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2021

Mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Penutup.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2021, DPMPTSP Kota Magelang melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2016-2021 dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.1
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya investasi dan berkembangnya kerjasama kemitraan	Pertumbuhan nilai investasi PMA	15%	25.77%	171,83%
	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	436.43%	2909,5%
Meningkatnya kondusifitas iklim investasi dan daya saing investasi	Jumlah investor baru	200	872	436,43%
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77	79.40	103,1%

Tabel 2.2
Capaian Indikator Perangkat Daerah 2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi dan daya saing investasi	Jumlah kerjasama pemerintah dan investor	4	5	125%
2		Cakupan penanganan pengaduan masyarakat tentang pelayanan perijinan bidang investasi	100%	100%	100%
		Prosentase Implementasi SPIPISE	100%	100%	100%
3		Implementasi SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)	100%	100%	100%
4		Prosentase jenis layanan perizinan yang dilayani di PTSP	78%	100%	128,21%

Kinerja tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi III dengan tujuan Meningkatnya investasi dan kerjasama kemitraan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Hasil capaian kinerja pada tahun 2021 dari seluruh indikator yang telah ditetapkan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kondusifitas iklim investasi dan daya saing investasi, dan dapat kita lihat bahwa seluruh indikator masuk dalam kategori sangat baik karena nilai capaian kinerja dari seluruh indikator berada diatas 100%.

1. Indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA

Nilai realisasi investasi PMA dari tahun 2015 sampai dengan 2021 tercatat Rp. 243.776.000.000. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dasar yang dijadikan dasar perhitungan PMA yaitu realisasi PMA yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2015, dengan nilai sebesar Rp. 193.821.000.000,-. Sehingga Indikator kinerja pertumbuhan nilai investasi PMA sampai tahun 2021 tercapai sebesar 171,83% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 penambahan realisasi investasi PMA sebesar 10.521.000.000 dari 1 perusahaan asing yaitu PT. Dominos Pizza. Tercapainya indikator pertumbuhan nilai investasi ini karena pelaporan realisasi investasi sudah terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha dengan menggunakan aplikasi OSS sehingga pengusaha dimudahkan untuk melakukan perizinan hingga pelaporan LKPM secara terpadu pada satu sistem aplikasi. Dan juga karena meningkatnya jumlah kegiatan pengawasan dan pemantauan serta pembinaan kepada perusahaan maupun pelaku usaha yang anggarannya berasal dari anggaran Dana Alokasi Khusus.

2. Pertumbuhan nilai investasi PMDN

Nilai realisasi investasi PMDN dari tahun 2015 sampai dengan 2021 tercatat Rp. 2.490.722.000.000. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dasar yang dijadikan dasar perhitungan PMDN yaitu realisasi PMDN yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2015, yaitu sebesar 464.317.000.000,-. Sehingga Indikator Kinerja pertumbuhan nilai investasi PMDN pada tahun 2021 mencapai 2909,5%. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi investasi PMDN bertambah sebesar 573.824.000.000,- yang merupakan nilai investasi dari 5.352 perusahaan dengan penambahan nilai realisasi investasi terbesar

berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Seperti halnya dengan indikator realisasi PMA laporan LKPM untuk PMDN juga dilaksanakan melalui aplikasi OSS sehingga satu sistem aplikasi ini digunakan dari proses perizinan hingga pelaporan LKPM yang diharapkan akan semakin memudahkan pengusaha.

3. Jumlah Kerja sama Pemerintah dengan Investor

Untuk indikator kerjasama pemerintah dengan investor pada tahun 2021 tidak ada penambahan jumlah MOU, karena ketertarikan dari investor yang dituangkan dalam Letter Of Intent (LOI) masih dalam taraf peninjauan dan pendalaman untuk proses realisasinya. Pada tahun 2021 terdapat 2 LOI hasil kegiatan Central Java Business Forum (CJIBF) yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah yaitu PT. Agra Megah International dan CV. Laksana Motor Purwodadi . Indikator Jumlah kerjasama pemerintah dan investor selama masa renstra dimana telah terjalin 5 kerjasama yaitu :

1. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Magelang dengan PT. Balitowerindo Sentra.
2. Perjanjian kerjasama DPMPTSP dengan A&J Advertising
3. Perjanjian kerjasama DPMPTSP dengan PT. Diistrindo Jaya.
4. Perjanjian kerjasama DPMPTSP dengan Micro Computer.
5. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kota dengan PT Grha karya investama

Keberhasilan pencapaian indikator kerja ini karena dilaksanakannya kegiatan promosi dalam berbagai strategi baik secara digital maupun tatap muka langsung. Selain itu didukung pula dengan dengan kegiatan penyusunan kajian potensi dan peluang investasi pada kawasan-kawasan baru salah satunya adalah di kawasan shopping centre dengan peruntukan pertokoan 5 lantai, maupun pemberian fasilitas insentif/ kemudahan penanaman modal.

4. Jumlah Investor Baru

Indikator jumlah investor baru pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah investor baru sejumlah 872 yang jauh melampaui target indikator kinerja yang ada di angka 200 investor baru. Peningkatan jumlah investor baru ini sebagian besar dari usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami peningkatan dalam proses

perizinan yang pada tahun 2021 ini dilayani menggunakan aplikasi OSS.

5. Cakupan penanganan pengaduan masyarakat tentang pelayanan perijinan bidang investasi

Untuk indikator Cakupan Penanganan pengaduan termasuk prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan standar ISO 9001:2015, dimana telah terdapat prosedur mutu/ SOP dan standar pelayanan pengaduan. Tim penanganan pengaduan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 510.4/78/330 Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang pada Tahun 2021. Pengaduan yang telah ditangani selama tahun 2021 sejumlah 8 aduan, dan telah dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Klasifikasi aduan berdasarkan kategori permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan aduan yang masuk, dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis masalahnya yaitu terkait pelayanan kepada masyarakat dan IMB. Sementara itu berdasarkan jenis aduan yang dilaporkan, 6 pengaduan dilaporkan tanpa yang bersangkutan menerima layanan di DPMPTSP dan 2 pengaduan dilaporkan setelah menerima layanan di DPMPTSP. Pada tahun 2021 sebagian besar masyarakat mulai menggunakan media digital untuk menyampaikan pengaduan karena diharapkan mendapatkan perhatian yang lebih hal tersebut dapat dilihat dari 8 pengaduan 6 pengaduan dilakukan melalui media sosial, selain itu juga teknologi yang semakin berkembang dapat semakin memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Untuk seluruh pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti seluruhnya dalam kurun waktu kurang dari 5 hari sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

6. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat didapat dari kegiatan Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Magelang. Untuk memperoleh saran dan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dilaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan aplikasi berbasis online,

yang selain bisa diisi secara langsung melalui website atau di ruang pelayanan kantor DPMPTSP, juga link untuk mengisi survey dikirimkan melalui pesan singkat kepada masyarakat penerima layanan.

Untuk nilai SKM di triwulan 4 tahun 2021 79,4 nilai tersebut masih diatas target yang ditetapkan, namun kenaikannya masih sangat kecil. Nilai tersebut diperoleh dari 79 responden pada triwulan 4 sedangkan jumlah responden secara keseluruhan pada tahun 2021 adalah 402 responden.

7. Prosentase Implementasi SPIPISE

Implementasi SPIPISE telah dicapai pada Tahun 2017 dengan diterbitkannya 5 izin Penanaman Modal , dan 4 Izin Penanaman Modal pada Tahun 2018. Sesuai dengan regulasi terbaru setelah bulan Juni 2018 maka pemrosesan izin penanaman modal sudah dilakukan melalui OSS.

8. Implementasi SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)

Indikator ini adalah terimplementasikannya Sistem Informasi Peluang Investasi Daerah (SIPID) dengan kesesuaian 100% antara data didalam SIPID dengan potensi yang ditawarkan. Materi promosi adalah potensi dan peluang investasi Kota Magelang, peta investasi dan pelayanan perizinan Kota Magelang, Booklet Pariwisata, produk-produk unggulan UMKM Kota Magelang. Beberapa potensi investasi yang ditawarkan di Kota Magelang sesuai dengan aplikasi SIPID :

1) **Kawasan Soekarno Hatta “Pasar Induk” .**

Kawasan Soekarno Hatta dengan luas area 30.749 m² merupakan kawasan yang sangat potensial untuk mewadahi kegiatan perdagangan skala menengah dan besar. Terutama dalam hal perdagangan pada pasar tradisonal dimana komoditas pertanian banyak ditemui disekitar wilayah Kota Magelang. Sehingga perlu adanya pasar tradisional dalam hal ini pasar induk yang mampu menampung seluruh pedagang dan aktifitasnya dengan nyaman dan tidak mengganggu kegiatan disekitarnya. Letak kawasan Soekarno Hatta yang sangat strategis yang mempunyai aksesibilitas tinggi, karena berada pada jalur jalan arteri primer jalan Soekarno Hatta dan dekat dengan terminal tipe A Terminal Tidar. Untuk melaksanakan pembangunan Pasar Induk di Kawasan Soekarno Hatta membutuhkan modal investasi sebesar Rp 70.745.641.000,- akan didapat nilai NPV sebesar 12.633.029.000 dan

nilai IRR sebesar 13,07% dengan pengembalian modal selama 9 tahun.

- 2) **Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks Magelang Theatre.** Kawasan Eks Magelang Theatre dengan luas area 4.750 m² merupakan salah satu kawasan yang sangat strategis di Kota Magelang, karena terletak di pusat kota, tepatnya di sebelah timur alun-alun/jantung Kota Magelang. Senada dengan visi Kota Magelang, yaitu sebagai Kota Jasa, pengembangan kawasan sebagai pusat rekreasi masyarakat dengan konsep one stop entertainment yang dikembangkan dengan manajemen modern, sangat dibutuhkan sebagai daya tarik kota. Lokasi sangat strategis, mudah dijangkau serta didukung dengan akomodasi yang memadai. Untuk melaksanakan pembangunan di Kawasan Eks Magelang Theatre membutuhkan modal investasi sebesar Rp 197.187.157.923,- akan didapat NPV sebesar Rp 3.048.942.967,- dan nilai IRR sebesar 13,06% dengan pengembalian modal selama 11 tahun.

3) **Kawasan Jl. Gatot Subroto**

Kawasan Jl. Gatot Subroto memiliki luas lahan 5.417 m² merupakan salah satu kawasan yang sesuai dengan tata ruang memiliki peruntukan sebagai kawasan kesehatan, sehingga hal tersebut selaras dengan Perpres No. 79 Tahun 2019 yang memuat rencana pemerintah terkait pembangunan Rumah sakit Tipe C dan Rumah Sakit Khusus/Rujukan. Terdapat 3 alternatif investasi yang dapat dipilih untuk memaksimalkan investasi, 3 alternatif tersebut dibedakan dari jumlah kapasitas pasien yang dapat dilayani. Adapun modal investasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 125.000.000.000 sampai Rp. 300.000.000.000, dengan NPV sebesar Rp. 39.898.048.000 sampai Rp. 263.030.535.000 dengan payback period selama 20,46 sampai 18,19 tahun.

4) **Kawasan Sidotopo**

Kawasan Sidotopo memiliki luas area 26.500 m² dan sesuai dengan tata ruang kota memiliki peruntukan kawasan perdagangan dan jasa. Sebagai Kota Jasa maka investasi di sektor perdagangan dan jasa menjadi magnet utama untuk melayani daerah sekitarnya. Kawasan Sidotopo ini dapat dikembangkan menjadi Mall dan Hotel dengan modal investasi sebesar Rp. 419.479.000.000 dan nilai NPV Rp. 42.713.608.346 dengan payback period selama 11 tahun.

Sistem SIPID ini masih terus dikembangkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BKPM. Untuk kajian-kajian baru yang sudah dibuat kedepan juga akan dipublikasikan di aplikasi SIPID ini.

9. Persentase jenis layanan perizinan yang dilayani di PTSP

Untuk indikator jenis layanan perizinan yang dilayani di PTSP pada tahun 2021 sudah mencapai 100% karena seluruh izin hasil investarisasi yang berjumlah 84 izin sudah didelegasikan ke DPMPTSP.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu penting dan permasalahan yang diangkat pada lingkup Kota Magelang terkait urusan penanaman modal yaitu :

- a. **Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP)** di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pusat pelayanan yang modern dan terintegrasi harus menjadi budaya penyelenggara. Dimana akan tergabung OPD dan instansi vertikal dalam memberikan pelayanan publik terintegrasi di satu tempat/bangunan. Masyarakat bisa mengurus KTP, SIM, Paspor dan membayar di satu tempat. Bangunan MPP harus memenuhi syarat bisa melayani masyarakat berkebutuhan khusus, ramah untuk ibu dan anak serta berada di lokasi strategis ;
- b. Regulasi Baru terkait **Undang-Undang Cipta Kerja** yang berpengaruh terhadap kebijakan dan mekanisme prosedur pelaksanaan pemberian perizinan dan non perizinan (Risk Based Approach) dan penyesuaian kelembagaan DPMPTSP dimana akan dilaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
- c. **Implementasi OSS versi RBA** sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengajuan izin usaha. Bagaimana mensosialisasikan dan membudayakan masyarakat untuk berperan secara aktif dan mandiri dalam pengajuan izin melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi dan menekankan pada porsi fungsi pengawasan terintegrasi yang lebih besar.
- d. Dari capaian kegiatan investasi di Kota Magelang 5 tahun terakhir, masih banyak potensi investasi yang dapat dihimpun yang masih

terkendala. Belum optimalnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Magelang dan banyak izin usaha yang belum efektif berakibat belum optimalnya realisasi investasi di Kota Magelang dari hasil pemantauan LKPM.

e. WBK

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Kementrian/ Lembaga yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

f. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi terhadap 8 area perubahan bertujuan untuk terjadi perubahan yang sistematis dan konsisten agar pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik. Salah satu area yang menjadi fokus reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas layanan publik. Perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk dalam komponen pengungkit pada penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, sedangkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat termasuk dalam komponen hasilnya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan Magelang Kota Cerdas dapat berperan sebagai pendorong dalam upaya perbaikan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi percepatan layanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika serta sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksana. Pada aspek manajerial perlu perbaikan manajemen SDM aparatur melalui implementasi sistem merit secara menyeluruh. Diharapkan melalui

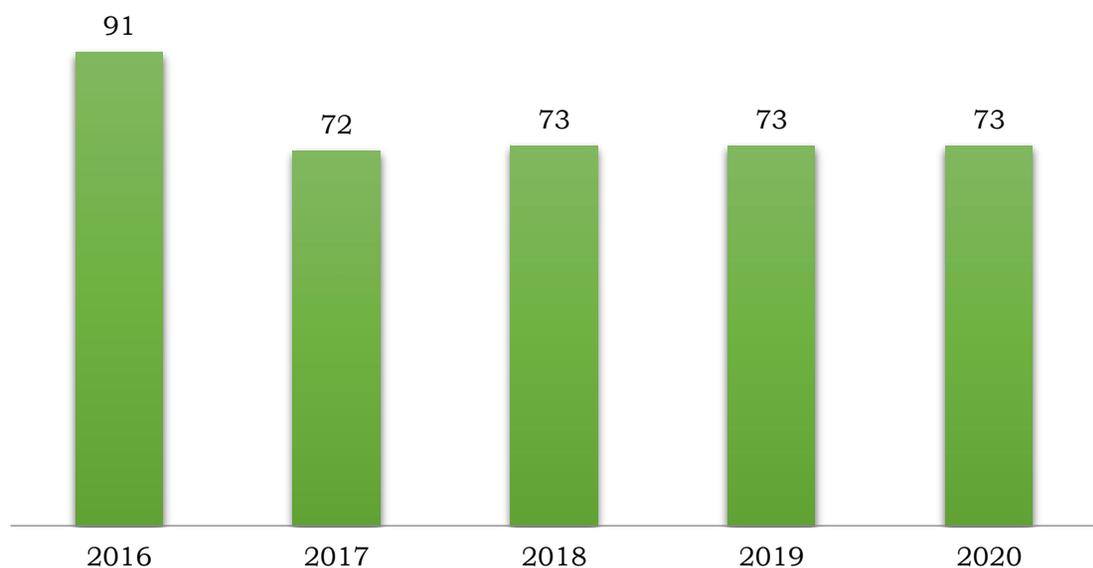
optimalisasi pemanfaatan TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan manajemen SDM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus terwujud reformasi birokrasi untuk Kota Magelang yang lebih baik.

g. Kemudahan Berbisnis

Pemerintah pusat tengah gencar dalam meningkatkan posisi/ peringkat Indonesia dalam hal Ease of Doing Business (EoDB – Kemudahan berbisnis). Survey terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara yang disurvei. Target yang akan dicapai adalah peringkat 40. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi dalam rangka menaikkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, dan mengupayakan bahwa paket kebijakan ekonomi tersebut dapat terlaksana sampai pada level terendah di daerah. Upaya ini telah menunjukkan hasil pada beberapa tahun terakhir sebagaimana grafik berikut :

Grafik 2.1

Grafik Perkembangan Kemudahan Berusaha di Indonesia



Isu global juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari kajian kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional antara lain pencapaian SDG's, Smart City, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dimana dalam penyusunan dokumen perencanaan DPMPTSP juga menyusun GBS (Gender Budget Statement) dan GAP (Gender Analysis Pathway) dan dalam menjalankan tugas pokok fungsi pelayanan

kepada masyarakat juga berspektif gender. Antara lain menyediakan ruang laktasi, menyediakan fasilitas untuk disable, ruang bermain anak dan menyediakan layanan prioritas.

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya Realisasi Investasi	Masih Rendahnya Minat Investor Untuk Berinvestasi di Kota Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Strategi promosi PM yang kurang bervariasi 2. Penyusunan strategi promosi PM yang belum optimal 3. Fasilitas insentif dan kemudahan PM belum dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha 4. Sosialisasi tentang perwal pemberian insentif dan Kemudahan PM belum optimal 5. Peta potensi dan peluang investasi belum tergali secara maksimal 6. Kurangnya pemahaman investor akan Peta potensi dan peluang investasi 7. Belum semua peraturan dibuat atau diperbaharui
		Belum diperbaharuinya data penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan PM belum optimal 2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem OSS untuk LKPM 3. Belum adanya reward dan punishment kepada pengusaha atas kepatuhan pelaporan LKPM
		Pelayanan Perizinan Kepada Masyarakat Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan belum terintegrasi dan terpadu di satu tempat 2. Proses rekomendasi teknis masih membutuhkan waktu yang lama sehingga belum bisa diintegrasikan dalam satu sistem dengan standar lama pelayanan selama 5 hari 3. Aplikasi Sistem pelayanan perizinan dikembangkan oleh pemerintah pusat sehingga integrasi dengan lembaga dan

NO	MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
			<p>instansi lain harus dikoordinasikan oleh pemerintah pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Aplikasi yang masih baru dan dianggap susah oleh masyarakat 5. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap cara pengajuan izin secara online 6. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi mengenai standar pelayanan dan prosedur penanganan pengaduan dan Jaringan internet masing-masing instansi yang terkadang mengalami gangguan sehingga berpengaruh terhadap lama waktu klarifikasi dan tindak lanjut, Selain itu aplikasi LAPOR dan MONGGO LAPOR belum terintegrasi sehingga pengaduan bisa terjadi duplikasi pada aplikasi tersebut 7. Belum semua izin dilimpahkan ke DPMPTSP 8. OPD Pengampu belum memahami peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perizinan harus dilimpahkan ke PTSP 9. Komitmen sebagai syarat izin usaha efektif belum dipenuhi sehingga banyak izin yang belum efektif 10. Masyarakat masih belum memahami cara pengajuan izin usaha menggunakan aplikasi OSS maupun izin non berusaha melalui aplikasi Si Cantik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2022 adalah Tahun awal pelaksanaan RPJMD 2021-2026 sesuai dengan Visi Misi Walikota terpilih. Berdasarkan Visi Walikota Kota Magelang yaitu “ **MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA**”. dengan 5 Misi yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang mendukung dalam Misi ke-3 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif dan Misi ke-4 yakni Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Grafik 2.2



Tema pembangunan Kota Magelang Tahun 2022 adalah “ Penanganan Kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang memiliki keterkaitan sebagai berikut :

- Misi ke 3** : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif.**
- Tujuan : Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel dan inovatif .
- Sasaran ke 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

Misi ke 4 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Tujuan : Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif .

Sasaran ke 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Indikator Sasaran : Persentase Pertumbuhan Investasi

Merujuk pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 DPMPTSP merencanakan 6 program dengan 12 kegiatan dengan ditetapkannya pagu indikatif awal anggaran DPMPTSP Tahun 2022 sebesar Rp. 6.883.397.000,- sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tanggal 2 Juli 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat daerah Kota Magelang Tahun 2022.

Pada perubahan rencana kerja tahun 2022 DPMPTSP merencanakan 6 program dengan 12 kegiatan, dimana pada 2 kegiatan terdapat penamabahn anggaran untuk optimalisasi pencapaian indikator yaitu kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan ditetapkannya pagu indikatif anggaran DPMPTSP tahun 2022 sebesar Rp. 7.350.554.348,-

Adapun rincian penambahan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perubahan rencana anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara terpadu di Mal Pelayanan Publik maupun untuk :

Tabel 2.4

Kegiatan Baru Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Penjelasan
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Pembangunan gerai investasi di ruang ex pelayanan perizinan di kantor DPMPTSP dan melaksanakan pameran investasi
2	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengadaan peralatan SIM online dan penambahan tenan MPP dan sarana prasarana pendukungnya.
3	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Pengadaan Software GIS penanaman modal dan PTSP, software profil investasi,

	Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	pengadaan perangkat Wa Gateway dan pemeliharaan jaringan internet
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan oleh Universitas Brawijaya
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penambahan anggaran untuk kenaikan tarif dasar listrik
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan bakar bakar minyak untuk kendaraan dinas jabatan
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehabilitasi kamar mandi MPP

Selain adanya penambahan anggaran karena adanya beberapa kegiatan baru, pengurangan anggaran juga dilakukan untuk efisiensi dan penyesuaian kebutuhan pada penyediaan bahan logistik kantor. Sedangkan untuk pemeliharaan aset masih belum proporsional dengan jumlah aset yang dimiliki sehingga banyak aset yang tidak terpelihara dengan optimal. Kedepan perlu dilakukan langkah-langkah inventarisasi aset yang sudah tidak berfungsi optimal untuk dilakukan penghapusan dan penggantian dengan aset baru.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Layanan yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat, bahkan melebihi harapan publik. Tahun 2022 tidak ada usulan Pokir atau hasil musrenbang yang diakomodir oleh DPMPTSP.

Selaras dengan tujuan tersebut, DPMPTSP Kota Magelang dalam rangka menyediakan layanan yang terbaik bagi masyarakat telah melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat langsung, antara lain melalui :

Tabel 2.5
Program Kegiatan Yang Berhubungan Masyarakat Langsung

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
Program Pelayanan Penanaman Modal			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Melayani masyarakat yang mengajukan perizinan berusaha dari memberikan informasi sampai dengan menerima berkas izin
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Memantau pemenuhan komitmen/persyaratan yang belum dipenuhi oleh pemohon izin setelah diterbitkannya NIB (nomor induk berusaha) supaya izin menjadi efektif. Kegiatan juga melaksanakan survey ke lapangan.
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Memberikan konsultasi dan menangani keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait perizinan maupun

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
		terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	penanaman modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Melayani pengusaha yang mengajukan permohonan fasilitas/insentif maupun kemudahan penanaman modal
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM			
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengembangan sistem perizinan berbasis elektronik dengan memanfaatkan website, aplikasi, peralatan/mesin untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengajukan perizinan online, memantau online maupun menerima layanan online.
Program Pengendalian Pelaksanaan PM			
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan		

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
	Daerah Kabupaten/Kota		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal	Melakukan kunjungan ke lapangan untuk memantau realisasi penanaman modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Melaksanakan sosialisasi /bimbingan teknis dengan mengundang pengusaha
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Melakukan kunjungan ke lapangan dalam rangka pengawasan penanaman modal

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Penanganan Kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM dan pengembangan potensi ekonomi lokal “

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

1. Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat;
2. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
3. Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
4. Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Jawa Tengah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19;

5. Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik investasi masuk ke Jawa Tengah;
6. Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.

Pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki visi yang akan diwujudkan di tahun 2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari; *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan *guyub* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2022 disusun sebagai respon terhadap kondisi Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19 dan dengan mempertimbangkan sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*bulid forward better*). Adapun tema pembangunan nasional tahun 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Selanjutnya prioritas nasional tahun 2022 yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Indikator sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,8 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 – 6,3 persen; dan
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,41 – 73,46.

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional terdapat 45 proyek prioritas strategis/*Major Project* (MP) yang diharapkan memiliki kontribusi signifikan dalam RKP Tahun 2022. Beberapa *major project* utama tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan yang membutuhkan dukungan antara lain:

1. MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter yaitu Kawasan Industri Batang meliputi perencanaan perizinan dan tata ruang KI dan smelter, pembangunan infrastruktur di dalam KI dan smelter, serta peningkatan investasi dan promosi ekspor;
2. MP Pengelolaan Terpadu UMKM meliputi penyediaan akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama, kurasi dan standardisasi produk, perluasan akses pasar dan kemitrausahaan, penyediaan akses pembiayaan, pendampingan SDM UMKM, serta regulasi dan pendataan UMKM;
3. MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi meliputi pembangunan aneka energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. MP Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu DPP Borobudur dan sekitarnya meliputi perintisan destinasi, pembangunan jalan, serta

- pembangunan bandara dan pelabuhan, pembangunan desa wisata, pembangunan amenitas, pembangunan kawasan dan wilayah;
5. MP reformasi Sistem Perlindungan Sosial meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi, penguatan integrasi kepesertaan dan informasi jaminan sosial, dan penguatan bantuan sosial;
 6. MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional meliputi penguatan sumber daya kesehatan, penguatan health security, serta pelayanan kesehatan;
 7. MP Reformasi Pendidikan Keterampilan meliputi revitalisasi SMK, transformasi BLK, dan reformasi Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK);
 8. MP Transformasi Digital meliputi digitalisasi di sektor kesehatan, perdagangan, perdesaan, koperasi UMKM, bantuan sosial, literasi masyarakat, SDM digital, dan keamanan siber;
 9. MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan B3 meliputi fasilitas pengolahan limbah B3 medis dan fasyanker, serta pengolahan limbah B3 terpadu.

Adapun sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 – 5,84 persen;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 10,27 – 11,42 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,06 – 5,89 persen.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2021. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing SDM, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**" yang dijabarkan dalam **prioritas daerah** tahun 2022 dengan fokus sebagai berikut:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana.
Upaya penguatan terhadap perekonomian daerah akan terus dilakukan di tahun 2022 dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kejadian pandemi Covid-19 di tahun 2020 memberikan guncangan cukup berat pada sektor perekonomian sehingga diperkirakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk pemulihan. Prioritas daerah ini didukung oleh program program prioritas pembangunan daerah urusan penanaman modal meliputi:
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal;
 - 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan basic need access untuk mengurangi beban pengeluaran, sustainable livelihood untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Prioritas daerah ini didukung oleh program program prioritas pembangunan daerah urusan penanaman modal yaitu Program Promosi Penanaman Modal.
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing.
Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.
Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap segala dinamika yang terjadi. Prioritas daerah ini didukung oleh program program prioritas pembangunan daerah urusan penanaman modal yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal. Tugas pokok DPMPTSP Kota Magelang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Selain melaksanakan urusan penanaman modal, DPMPTSP juga melaksanakan fungsi sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Selanjutnya penjabaran tugas pokok tersebut diwujudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja OPD Tahun 2022 sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran pada Renstra DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RKPD Kota Magelang tahun 2022. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah seperti pada tabel berikut. .

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Tahun 2022 Pada
DPMPTSP Kota Magelang

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	2022 Target
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif					
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan		IKM Pelayanan Perizinan	indeks	83,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perizinan	Hari	4,5
				Hari	2
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD		Hasil Penilaian SAKIP		BB
		Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP		70
Misi 4 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan					
1	Meningkatnya investasi		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	%	16
		Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Investor	3

Definisi operasional dari setiap indikator tersebut serta cara perhitungannya dapat dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Indikator Kinerja Daerah Pada
DPMPTSP Kota Magelang

No	Indikator Renstra	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	IKM Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	Hasil Perhitungan dari 9 unsur sesuai Juknis dari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
2	Rata-rata lama waktu pelayanan perizinan	Waktu pelayanan perizinan adalah ukuran waktu yang telah digunakan oleh pemohon izin dalam pengajuan suatu permohonan izin/layanan perizinan dan non perizinan dimulai dari berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan	Jumlah waktu pelayanan perizinan/ Jumlah Izin
3	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	Investasi adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri	$\text{Pertumbuhan investasi} = \frac{jml\ inves\ tn\ n - jml\ inves\ th\ (n - 1)}{jml\ inves\ th\ (n - 1)} \times 100\%$
4	Jumlah Investor berskala Nasional (PMA/PMDN)	Investor berskala nasional adalah investor yang memiliki usaha di lebih dari satu daerah/Kab/Kota Target Investor berskala nasional periode 2022 – 2026 : 3 investor/tahun	Jumlah investor berskala nasional PMA/PMDN tahun n

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dan mengacu pada pencapaian target indikator pada renstra, maka pada tahun ini direncanakan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikatif Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pelayanan Penanaman Modal		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data

		dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester an SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

		Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitas Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penataan Organisasi	

		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab kota	
		Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota
Program Promosi Penanaman Modal		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota
Program Pengendalian Pelaksanaan PM		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Koordinasi dan

		Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Berikut adalah matriks Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimuat dalam Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.24/218/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022. Matriks tersebut selanjutnya disandingkan dengan Rencana Pelaksanaan Kinerja Tahun 2022 pada Tabel 3.4 yang telah disusun sebelumnya.

2	1	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	26 orang	26 orang	12 bulan	12 bulan	4.695.694.000	3.798.449.326	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	4.000.000.000
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	430.000	430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	1.000.000
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran OPD yang disusun	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	13 laporan	13 laporan	12 bulan	12 bulan	1.440.000	4.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	2.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Tercapainya tertib administrasi keuangan OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	12 bulan	12 bulan	398.000	398.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	800.000
2	1	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											99.088.000	126.191.000				149.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangan	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	13 ruangan	13 ruangan	12 bulan	12 bulan	1.796.000	1.796.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	2.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah ASN dan THL yang disediakan makan minumannya	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	44 orang	44 orang	12 bulan	12 bulan	28.560.000	20.951.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	6.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah jenis barang yang dicetak	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	7 jenis	7 jenis	12 bulan	12 bulan	7.938.000	8.938.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	12.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	2 jenis	2 jenis	12 bulan	12 bulan	1.440.000	1.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	1.500.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan material pembersih kantor yang tersedia	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	23 jenis	23 jenis	12 bulan	12 bulan	26.086.000	26.086.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	4.500.000
2	1	0	2.0	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	10 kunjungan	15 kunjungan	12 bulan	12 bulan	2.700.000	3.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	3.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Tercapainya tertib administrasi umum OPD	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan	35 kegiatan	35 kegiatan	12 bulan	12 bulan	30.568.000	63.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	120.000.000

2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									682.741.000	769.250.624					743.400.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah surat yang dikirim	Terwujudnya tertib administrasi penunjang urusan pemerintahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	20 surat	35 surat	12 Bulan	12 Bulan	350.000	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	400.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Terwujudnya tertib administrasi penunjang urusan pemerintahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	4 rekening	4 rekening	12 Bulan	12 Bulan	462.540.000	514.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	500.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Terwujudnya tertib administrasi penunjang urusan pemerintahan	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	17 orang	10 orang	12 Bulan	12 Bulan	219.851.000	254.060.624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	243.000.000
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									127.122.000	159.814.000					94.500.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan jabatan dinas yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	18 kendaraan	18 kendaraan	12 bulan	12 bulan	69.914.000	82.624.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	55.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan operasional lapangan dinas yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	5 kendaraan	5 kendaraan	12 bulan	12 bulan	45.039.000	45.039.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	30.000.000
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	5 buah	5 buah	12 bulan	12 bulan	500.000	500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	1.500.000
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan mesinnya yang terpelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	21 unit	20 unit	12 bulan	12 bulan	11.669.000	11.669.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	8.000.000
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	null	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	12 bulan		1 paket	12 bulan	12 bulan	0	19.982.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	0
2	1	0	2.		Penataan Organisasi									3.285.000	3.285.000					10.000.000	
2	1	0	2.1	0	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Jumlah laporan peningkatan kinerja organisasi yang tersusun	Terlaksananya kegiatan reformasi birokrasi	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	12 bulan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	1 kegiatan	1 kegiatan	3.285.000	3.285.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	12 bulan	10.000.000
2	1	0			Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022									495.916.000	495.916.000					39	349.923.000

2	1	0	2.0	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan	Terbitnya perizinan sesuai dengan SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 % 95 %	96 % 95 %	500 Izin	150 Izin	100 %	100 %	114.149.000	126.150.208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	96 % 95 %	153.519.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	Terselenggaranya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat Terselenggaranya layanan konsultasi PNP	Terbitnya perizinan sesuai dengan SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 % 95 %	96 % 95 %	10 pengaduan 20 layanan	10 pengaduan 240 layanan	100 %	100 %	1.713.000	1.713.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	96 % 95 %	11.326.000	
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kepada perusahaan yang Terlaksananya pemberian fasilitas / insentif daerah	Terbitnya perizinan sesuai dengan SOP	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 % 95 %	96 % 95 %	2 dokumen 12 kegiatan	2 dokumen 12 kegiatan	100 %	100 %	9.536.000	11.180.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Tepat Waktu Prosentase penerbitan perizinan dan non perizinan yg sesuai SOP	96 % 95 %	11.236.000	
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												427.569.000	431.581.692				94.141.000
2	1	0	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												427.569.000	431.581.692				94.141.000
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	Terlaksananya pemantauan penanaman modal	Terlaksananya pengendalian PM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 15 % 100 %	15 % 15 % 100 %	100 perusahaan	100 perusahaan	100 %	100 %	80.455.000	36.297.692	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	15 % 15 % 100 %	41.250.000	

2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	Terlaksananya pembinaan penanaman modal	Terlaksananya pengendalian PM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 15 % 100 %	15 % 15 % 100 %	100 pengusaha	362 pengusaha	100 %	100 %	285.434.000	337.752.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	15 % 15 % 100 %	33.267.000
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	Terlaksananya pengendalian PM	Kota Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 % 15 % 100 %	15 % 15 % 100 %	100 perusahaan	50 perusahaan	100 %	100 %	61.680.000	57.532.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kesesuaian pelaksanaan penanaman modal Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan Prosentase Pelaku Usaha Yang Diberikan Pengendalian Pelaksanaan PM	15 % 15 % 100 %	19.624.000
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											50.889.000	142.882.000			75.000.000	
2	1	0	2.0	0	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											50.889.000	142.882.000			75.000.000	
2	1	0	2.0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola secara elektronik Prosentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	Tersedianya data dan informasi berbasis sistem terintegrasi Tersedianya laporan pelaksanaan PTSP	Terkelolanya data dan informasi perizinan berbasis elektronik	Kota Magelang, Magelang Tengah, Magelang	10 % 10 %	10 % 10 %	23 dokumen 1 laporan	8000 orang 10 data dan informasi	26 dokumen	26 dokumen	50.889.000	142.882.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola secara elektronik Prosentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	10 % 10 %	75.000.000
TOTAL																7.143.491.000	7.350.554.348			6.734.495.000	

Tabel 3.5
Rencana Pelaksanaan Kinerja Tahun 2022
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU)	Satuan Indikator	2022	Pengelola
										Target	
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif											
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat kota						IKM	Indeks	83.91	Kepala
			Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan					IKM Pelayanan Perizinan	Indeks	83.5	Kepala
				Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan				Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	Hari	4.5	Kepala
									Hari	2	Kepala
					Program Pelayanan Penanaman Modal			Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai dengan SOP	%	93.5	Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	80	Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
							Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan yang dilayani secara elektronik	Izin	2000	Sub Koordinator Administrasi Perizinan dan Non Perizinan
							Pemantauan Pemenuhan	Jumlah Perizinan	Izin	150	Sub

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2022	Pengelola
							Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	yang dipantau pemenuhan komitmennya			Koordinator Administrasi Perizinan dan Non Perizinan
							Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	Pemohon	250	Sub Koordinator Penanganan Pengaduan
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kepada perusahaan	Perusahaan	2	Sub Koordinator Peningkatan Layanan
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM			Persentase pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	%	10	Koordinator Penanaman Modal
						Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengelolaan data, informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik	%	80	Koordinator Penanaman Modal
							Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah masyarakat yang mengunjungi media informasi dan memahami tata cara pengajuan izin Tersedianya data dan informasi berbasis sistem terintegrasi yang dioah, dikaji dan dimanfaatkan	Orang Data dan informasi	8000 10	Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif											
2.			Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD					Hasil Penilaian SAKIP	Huruf	BB	Kepala
				Meningkatnya Nilai AKIP				Nilai SAKIP	Angka	70	kepala
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan			Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	%	100	Sekretaris

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2022	Pengelola
					Daerah Kab/Kota						
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	dokumen	8	Sekretaris
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	Sub Koordinator Program
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	dokumen	2	Sub Koordinator Program
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjingannya	Laporan	15	Sekretaris
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan akhir tahunSKPD	Orang	26	Sub Koordinator Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjingannya	Laporan	1	Sub Koordinator Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran OPD yang disusun Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi	Laporan	13	Sub Koordinator Keuangan

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2022	Pengelola
								anggaran yang disusun			
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran OPD yang disusun Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	Laporan	1	Sub Koordinator Keuangan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya tertib administrasi umum OPD	kegiatan	7	Sekretaris
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya	Ruangan	13	Subag Umum
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN dan THL yang disediakan makan minumannya	orang	44	Subag Umum
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak	Jenis	7	Subag Umum
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jenis	2	Subag Umum
							Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan material pembersih kantor yang tersedia	jenis	23	Subag Umum
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kunjungan	15	Subag Umum
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kegiatan	35	Subag Umum
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya jasa penunjang kantor	Kegiatan	3	Sekretaris
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Surat	35	Subag Umum
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumber daya yang dibayar tiap	Rekening	4	Subag Umum
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	10	Subag Umum

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2022	Pengelola
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Jenis	4	Sekretaris
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan jabatan dinas yang terpelihara	Kendaraan	18	Subag Umum
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan dinas yang dipelihara	Kendaraan	5	Subag Umum
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara	Buah	5	Subag Umum
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesinnya yang terpelihara	Unit	20	Subag Umum
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Unit	1	Subag Umum
						Penataan Organisasi		Tersusunnya laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	Dokumen	1	Sekretaris
							Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan peningkatan kinerja organisasi yang tersusun	Laporan	1	Sub Koordinator Program
Misi 4 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan											
3.	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase pertumbuhan investasi						Persentase pertumbuhan investasi	%	16	Kepala
			Meningkatnya investasi					Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	%	16	Kepala
				Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja				Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Investor	3	Kepala
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Prosentase investor PMA/PMDN	%	100	Koordinator Penanaman Modal
						Penetapan Pemberian		Persentase Kesesuaian	%	100	Koordinator Penanaman

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2022	Pengelola
						Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab kota		Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP			Modal
							Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dievaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM nya	Perusahaan	2	Sub Koordinator pengembangan Iklim Penanaman Modal
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota		Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	%	20	Koordinator Penanaman Modal
							Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan yang terkait penanaman modal yang tersusun	Dokumen	4	Sub Koordinator pengembangan Iklim Penanaman Modal
							Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota	Jumlah dokumen profil potensi dan peluang investasi yang ditetapkan	Dokumen	1	Sub Koordinator pengembangan Iklim Penanaman Modal
					Program Promosi Penanaman Modal			Persentase LOI yang ditindaklanjuti	%	100	Koordinator Penanaman Modal
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)	%	10	Koordinator Penanaman Modal
							Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	Dokumen	1	Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal
							Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	LOI	4	Sub Koordinator Promosi Penanaman

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2022	Pengelola
					Program Pengendalian Pelaksanaan PM			Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	15	Koordinator Penanaman Modal
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	50	Koordinator Penanaman Modal
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modalnya	Perusahaan	100	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Perusahaan	362	Sub Koordinator Pengendalian Penanaman Modal
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	Perusahaan	50	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Perubahan Tahun 2022. Rencana kerja ini secara substansial merupakan perencanaan tahun pertama pada pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dokumen ini telah menyelaraskan pada arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kota Magelang tahun 2022.

Dalam perkembangannya apabila terdapat perubahan kondisi makro nasional maupun daerah atau terdapat kebijakan lainnya maka dimungkinkan untuk mengubah dokumen ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sebagai perubahan rencana kerja tahun 2022. Sebelum adanya perubahan dokumen ini maka rencana kerja ini digunakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan rencana kerja didahului dengan mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, memperhatikan arah dan prioritas kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah serta target capaian rencana strategis Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, memperhitungkan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya serta mengacu pada perencanaan jangka panjang dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 DPMPTSP Kota Magelang melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp. 7.350.554.348 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), sesuai dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.24/218/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026.

Dalam pelaksanaan diharapkan agar setiap pengelola kegiatan benar-benar mencermati dan melaksanakan rencana kerja yang telah tersusun dalam dokumen ini dengan sebaik-baiknya serta menjabarkannya dalam dokumen pelaksanaan lainnya termasuk dalam hal penganggaran dan pengaturan waktu pelaksanaannya. Diharapkan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana seluruhnya dengan memberikan manfaat dan capaian sasaran sebagaimana telah ditargetkan pada awal perencanaan.

Magelang, 22 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi,
dan Keuangan Kota Magelang



HAMZAH KHOLIFI, S. Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680530 199001 1 001